

SKRIPSI

**“ANALISIS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN ENREKANG”**



DISUSUN OLEH:

MUH. FAQRAM DWI FACHREZA

E051 191 006

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**“ANALISIS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BIDANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN ENREKANG”**

Yang Diajukan Oleh:

Muh. Faqram Dwi Fachreza

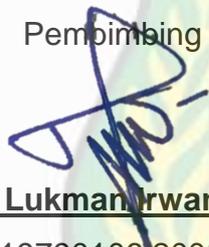
E051 191 006

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Pada Tanggal 14 Februari 2023.

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si

NIP. 19790106 200501 1001

Pembimbing II



Saharuddin, S.IP, M.Si

NIP. 19960403 202204 3001

Mengetahui

Ketua Departemen

Ilmu Pemerintahan



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

“ANALISIS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN ENREKANG”

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Muh. Faqram Dwi Fachreza

E051 191 006

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia
ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 26 Februari 2023

Menyetujui

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	()
Sekretaris	: Saharuddin, S.IP, M.Si	()
Anggota	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	()
Anggota	: Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si	()
Pembimbing Utama	: Dr. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	()
Pembimbing Pendamping	: Saharuddin, S.IP, M.Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Faqram Dwi Fachreza
Nim : E051191006
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**“Analisis Pelaksanaan Penyelenggaraan Bidang Pendidikan
di Kabupaten Enrekang”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Februari 2023

Yang Menyatakan



Muh. Faqram Dwi Fachreza

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kemudahan, kesabaran, serta kelancaran penulis dalam menyelesaikan penelitian untuk skripsi ini dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Di Kabupaten Enrekang”**

Shalawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan umatnya kenikmatan hidup di masa yang terang benderang. Penelitian ini menjadikan awal bagi penulis untuk memasuki pintu ilmu pengetahuan yang sangat luas serta pelajaran berharganya tentang pentingnya sabar dan tak kenal menyerah di tengah banyaknya rintangan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penyusunannya menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya atas argumentasi dan kesimpulan dalam penelitian ini.

Selain itu terimakasih yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada kedua orang tua penulis, Ibunda **Alfi Dezi Harvani, S.E** segala cinta dan kasih sayang penulis sebagai seorang anak kepada ibundanya, ibu yang selalu sabar dan kuat dalam membimbing dan menuntun anaknya hingga dapat berada pada posisi sekarang ini, semoga apa yang dicita-citakan oleh mama dapat tercapai Aamiin Ya Allah. Selanjutnya Ayahanda penulis **Drs. Arfan Renggong, M.Si**, sosok ayah yang betul-betul mengajarkan apa arti kehidupan yang sebenarnya, yang dapat menjalani hidup, yang membimbing

bagaimana menjadi sosok laki-laki yang dapat memimpin diri sendiri dan juga orang-orang penting yang ada di kehidupan kita, semoga apa yang diharapkan oleh papa dapat kita wujudkan bersama-sama Aamiin Ya Allah. Teruntuk saudara-saudari penulis, **Reynaldi Hadi Premadana, Muh. Fiqram Dwi Fachriza** dan **Cantika Yean Tiffany**, yang juga selalu mensupport penulis dalam segala hal termasuk dalam waktu-waktu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis sangat sayang kepada kalian dan juga orang tua kita. Doa untuk kesehatan dan keselamatan mereka. *Rabbi firli wa liwalidayya warhamhumaa kamaa rabbayaanii shagiiraa.*

Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Almh. Titin Melazy**, yang sejak awal menjadi mahasiswa selalu memperhatikan penulis, selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang mahasiswa, selalu memberikan nasehat kepada penulis, Allah SWT. Lebih sayang kepada tante sehingga dipanggil untuk menghadap kepada sang pencipta, penulis sangat menyayangkan tante tidak melihat kemanakannya ini untuk wisuda nantinya. Semoga beliau tenang di alam sana dan diterima segala amalan baiknya termasuk amalan baiknya dalam merawat penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar **Nepa Nema** yang senantiasa memberikan dukungan dan doa tulus kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakek tercinta, **H. Alimuddin Ralla** sosok kakek

yang menginspirasi anak-anaknya sampai pada cucu-cucunya untuk terus menjalani hidup sebagaimana yang telah diatur oleh Allah SWT. Terima kasih karena selalu menasehati penulis selama menjalani kehidupannya. Serta untuk yang terkasih dan tersayang yang selalu menemani perjalanan dunia perskripsian **A. Pertiwi Puji Lestari** yang menjadi support system terbaik bagi penulis yang selalu memperhatikan dan memberikan dukungan bagi penulis, semoga selalu dalam kebaikan bersama orang terkasih. Tanpa cinta dan dukungan dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak hambatan yang dialami, namun berkat bimbingan dan dorongan dari dosen pembimbing dan pihak-pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menggunakan judul dalam penyusunan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, kepada:

1. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.

2. **Dr. Phill Sukri, S.IP, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik beserta para Wakil Dekan dan jajarannya, yang telah memberikan kemudahan dalam perizinan penelitian dan hal-hal penting lainnya.
3. **Dr. A. M. Rusli, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang telah mendukung dan memberikan izin dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. **Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si** dan **Dr. A. M. Rusli, M.Si** selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan Skripsi ini menjadi lebih baik.
5. **Dr. Andi Lukman Irwan S.IP, M.Si** selaku pembimbing utama dan **Saharuddin S.IP, M.Si** selaku pembimbing pendamping yang senantiasa sabar membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
6. Seluruh dosen pengajar **Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm)** **Prof. Dr. A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M.Si, Irwan Ade Saputra, S.IP. M.Si** terima

kasih atas pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini serta atas kuliah-kuliah inspiratifnya.

7. Seluruh pegawai dan staf fakultas khususnya serta staf dan pegawai departemen Ilmu Pemerintahan khususnya **Bapak Mursalim Mile S.IP** yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
8. Para Informan dalam penulisan Skripsi ini yang telah baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan juga melakukan wawancara terkhusus dalam hal ini **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang**.
9. **Ibu A. Syuaebah Asba, S.S** dan **Adik A. Nurul Fini**, terima kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan berkat dukungan dan perhatian yang diberikan selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
10. **ZEITGEIST 2019** Terima kasih untuk saudara – saudari seperjuangan sejak menyandang status mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas. Mulai dari **Andes** selaku ketua angkatan, **Adam, Hafiqi, Alm. Zaky, Edli, Ilham, Amirul, Firga, Ibnu, Eki, Wahyu, Ramlan, Rafli, Acos, Ila, Umi K, Inna, Aldi, Indah A, Lala, Lili, Lulu, Nunu, Puput, Stevy, Venike, Pute, Nisa, dan Rizka**. Terima kasih atas segala kisah suka duka yang kita lalui bersama dan semoga itu abadi

dikenangan kita semua.

11. **Ilmu Pemerintahan 2019**. Terima kasih telah bersama-sama mengemban ilmu dalam lingkaran jurusan yang sama, semoga teman-teman Government Science sukses dan berkah ilmunya.

12. **Himapem FISIP Unhas** yang telah menjadi Organisasi yang banyak memberikan pelajaran dalam mengembangkan keterampilan dan jiwa organisatoris bagi penulis, terima kasih atas semua pelajaran yang diberikan semoga dapat menjadi pengembangan diri bagi penulis dan semoga selalu jaya.

13. **Asrah Dewi Iloeyi** selaku saudari yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Saudara-saudara Bujangans/BC. **Pahri, Munif, Nanda, Aldi, Viki, Nunung, Ilham, Aat, Accang, Ardi, Anugerah, Abang** dan **Keluarga Besar Rusdin Tabi (RT)**.

15. Teman-teman KKN 108 Desa Wisata Maros “**Second Family**”. **Tiwi, Ridha, Fitri, Citra, Herul, Fadhil, Gita, Umi, Adnin**, dan **Alif**. Atas kebersamannya, memberikan semangat serta perhatian dan mewarnai KKN penulis.

Tanpa adanya mereka, mustahil penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Tentu mereka tidak bertanggung jawab atas segala kekurangan dalam penelitian ini. Akhir kata, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pembaca

yang pasti saran, masukan dan kritik sangat dinantikan oleh penulis.

Terima kasih.

ABSTRAK

MUH. FAQRAM DWI FACHREZA NIM E051191006 ANALISIS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN ENREKANG (DIBIMBING OLEH A. LUKMAN IRWAN DAN SAHARUDDIN)

Dalam Penelitian ini menganalisis terkait Pelaksanaan Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang dalam mengatur mengenai pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pada satuan pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Enrekang.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, studi kepustakaan dan juga dokumentasi. Adapun jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui wawancara dan juga literatur yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan Guru yang ada tidak mencukupi daripada satuan pendidikan dasar yang telah direncanakan, kekurangan Guru pada Sekolah Dasar sebanyak (-502) dan Guru Sekolah Menengah Pertama sebanyak (-120) Guru. Kondisi sarana dan prasarana yang juga masih belum sepenuhnya tercukupi karena masih ada sarana dan prasarana yang masih dalam proses pembangunan, Selanjutnya dijelaskan terkait faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Enrekang, faktor pendukung yakni lingkungan sekolah dan program guru penggerak. Faktor penghambatnya yakni lokasi sekolah dan penyebaran guru tidak merata.

Kata Kunci: Analisis pelaksanaan pendidikan Kabupaten Enrekang, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana.

ABSTRACT

MUH. FAQRAM DWI FACHREZA NIM E051191006 ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF EDUCATION SECTOR IN ENREKANG DISTRICT (GUARDED BY A. LUKMAN IRWAN AND SAHARUDDIN)

In this study, it analyzes the implementation of the implementation of the education sector in Enrekang Regency. This study aims to determine the role of the Enrekang Regency Education and Culture Office in regulating educators and education personnel as well as facilities and infrastructure in basic education units in Enrekang Regency.

The research method used in this thesis is a qualitative research method. Data collection is carried out by conducting direct interviews with related parties, literature studies and documentation. The types of data used are primary data and secondary data obtained through interviews and also relevant literature.

The results of this study show that the existing needs of teachers are insufficient than the planned basic education units, there is a shortage of teachers in elementary schools as many as (-502) and junior high school teachers as many as (-120) teachers. The condition of facilities and infrastructure is also still not fully fulfilled because there are still facilities and infrastructure that are still under construction, Furthermore, it was explained related to supporting and inhibiting factors in the implementation of education in Enrekang Regency, supporting factors, namely the school environment and the driving teacher program. The inhibiting factors are the location of schools and the uneven distribution of teachers.

Keywords: Analysis of the implementation of education in Enrekang Regency, Educators and Education Personnel, Facilities and Infrastructure.

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konsep Analisis.....	13
2.2 Konsep Pelaksanaan	16
2.3 Konsep Penyelenggaraan.....	18
2.4 Konsep Pemerintahan Daerah	19
2.5 Konsep Pendidikan	24
2.6 Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Fokus Penelitian.....	30
3.4 Informan.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Jenis Data.....	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37

4.1.1 Kabupaten Enrekang	37
4.1.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang	45
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	77
4.2.1 Pelaksanaan Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Di Kabupaten Enrekang	77
4.2.2 Pelaksanaan Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Kabupaten Enrekang	80
4.2.3 Pelaksanaan Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Terkait Sarana dan Prasarana Di Kabupaten Enrekang	98
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Di Kabupaten Enrekang	112
4.3.1 Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Di Kabupaten Enrekang	112
4.3.2 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Di Kabupaten Enrekang	117
BAB V PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan.....	122
5.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kekurangan Guru Di Kabupaten Enrekang.....	8
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Enrekang Dirinci Menurut Kecamatan	39
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang.....	40
Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Enrekang.....	41
Tabel 4.4 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar di Kabupaten Enrekang Tahun 2021/2022.....	82
Tabel 4.5 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Enrekang Tahun 2021/2022.....	82
Tabel 4.6 Kondisi Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Enrekang 2021/2022.....	83
Tabel 4.7 Kondisi Guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Enrekang 2021/2022.....	90
Tabel 4.8 Jumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Enrekang 2022.....	101
Tabel 4.9 Jumlah Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Di Kabupaten Enrekang 2020.....	102
Tabel 4.10 Uraian Pekerjaan Sarana dan Prasarana SD/SMP Di Kabupaten Enrekang 2021/2022.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Enrekang.....	38
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.....	77
Gambar 4.3 Kondisi Proses Belajar Mengajar SDN 74 Bolang Kabupaten Enrekang.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dalam posisinya masih dikatakan sebagai Negara berkembang sedang mencari bentuk tentang bagaimana cara dan upaya agar menjadi negara maju terutama dibidang pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia adalah mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan sistem pendidikan yang akan membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah hal ini sebagaimana visi dan misi Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.”

Adapun misi yang diemban oleh Sistem Pendidikan Nasional adalah:

“Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat (UU RI SISDKNAS: 41).”

Pasal 1 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk

mencapai tujuan pendidikan nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan.

Adapun komponen-komponen dalam pendidikan nasional antara lain adalah lingkungan, sarana-prasarana, sumber daya, dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut bekerja secara bersama-sama, saling terkait dan mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam UU Sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di samping komponen-komponen tersebut pendidikan juga meliputi aspek-aspek sistemik lainnya yaitu, Isi, Proses dan Tujuan. Implementasi dari aspek pendidikan isi adalah input (anak didik) sebagai obyek dalam pendidikan, sedangkan proses/trasformasi merupakan mesin yang akan mencetak anak didik sesuai yang diharapkan dan Tujuan merupakan hasil akhir yang dicapai atau output. Perlu diketahui bahwa proses/trasformasi dalam kerjanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fasilitas, waktu, lingkungan, sumber daya,

pendidik dan sebagainya, dimana faktor tersebut sangat menentukan output. Oleh karena itu sebuah sistem pendidikan perlu melakukan penyesuaian dengan lingkungan, karena lingkungan mengandung sejumlah kendala bagi bekerjanya sistem misalnya keterbatasan sumber daya dan juga sarana dan prasarana.

Untuk itu sistem pendidikan dituntut oleh lingkungan untuk mengolah sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian jelaslah bahwa makna pendidikan sebagai sistem adalah seluruh komponen yang ada dalam pendidikan yakni lingkungan, masyarakat, sumber daya dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan Pendidikan nasional, yang dalam implementasinya dapat dilihat dari aspek-aspek sistem yaitu input, proses dan output, dan hasil akhir dari output dapat memberikan umpan balik terhadap input dan proses sehingga dapat diketahui hasil akhir tujuan pendidikan.

Kondisi kinerja dan juga kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik dalam hal ini guru telah dibahas dalam beberapa penjelasan seperti dalam arti yang dikemukakan Barnawi dan M. Arifin. Menurut Barnawi dan M. Arifin (2012: 40) Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan serta manfaat penilaian kinerja guru untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses Pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif dan berdaya saing tinggi. Selain terkait kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, juga

menjelaskan terkait sarana dan prasarana Pendidikan. Menurut Barnawi dan M.Arifin (2012: 47) telah membedakan antara sarana Pendidikan dan prasarana Pendidikan. Sarana Pendidikan adalah semua perangkat sekolah yakni peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses Pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan ini prasarana Pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses Pendidikan di sekolah.

Pemerintah adalah pihak yang mengendalikan dan mengelola sistem pendidikan secara nasional. Meskipun dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan memiliki kesempatan yang seluas untuk berperan serta dalam menyelenggarakan atau mengelola unit pendidikan dengan tetap pada ciri-ciri identitasnya. Namun dalam praktiknya, semuanya ditentukan oleh pemerintah, lengkap dengan rambu-rambu dan ukuran-ukuran dalam penilaiannya.

Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka pembinaan dan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang antara lain dimanifestasikan dalam penyelenggaraan sekolah, keluarga, dan unit-unit pendidikan non-

formal lainnya, juga terasa kosong, formalis, tidak berjiwa, terpisah-pisah, dan lepas dari sentuhan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, budaya, dan nilai-nilai keadaban lainnya. Seperti disebutkan di awal, sekolah adalah milik masyarakat, bukan milik pemerintah, individu dan kelompok.

Peran pemerintah dan masyarakat dalam sistem pendidikan dikelola secara desentralistik atau otonom merupakan salah satu tuntutan di era reformasi. Desentralisasi pendidikan berhadapan dengan masalah yang sangat mendasar yaitu pendidikan adalah milik rakyat dan untuk rakyat (Tilaar, 2003: 26).

Gagasan desentralisasi pendidikan bukanlah dekonstruksi kekuasaan semata dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Itu berarti, pendidikan merupakan proses pengembangan kapasitas intelektual dari suatu bangsa. Bahkan lebih jauh, pendidikan merupakan hak serta milik rakyat yang dilahirkan dan dikembangkan di dalam masyarakat yang kongkrit. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan juga seharusnya mengikut sertakan masyarakat. Alasannya, masyarakat adalah stakeholder yang pertama dan utama dari proses pendidikan. Hal ini berarti proses pendidikan, tujuan pendidikan, dan sarana pendidikan, termasuk pula mutu pendidikan adalah merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat.

Di samping itu, pelaksanaan pendidikan hendaknya dilangsungkan secara demokratis dimana setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003).

Pada dasarnya pendidikan adalah proses pemanusiaan. Dalam prosesnya, pemanusiaan dalam pendidikan tidak datang dengan sendirinya tetapi datang dari masyarakat. Hal ini merupakan ciri dari sistem demokrasi pendidikan yang diharapkan. Semua keputusan ada pada anggota masyarakat yang terlibat dalam pendidikan baik secara individu maupun sosial.

Tuntutan pendidikan demikian dalam era modern adalah penyelenggaraan satuan pendidikan yang demokratis dan otonom yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan sekolah berbasis masyarakat yang mengusung budaya yang melingkari sekolah itu, namun tetap dalam nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan.

Pendidikan merupakan hak segala bangsa yang mengharuskan negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Pendidikan merupakan hal yang penting untuk diperbincangkan. Pasalnya ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang handal dilahirkan atas adanya pendidikan yang baik dan menyeluruh tersentuh untuk semua warga negara khususnya di Indonesia.

Pengelolaan pendidikan menjadi urusan pemerintahan yang wajib sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Masuknya pendidikan dalam Undang-undang pemerintahan daerah tersebut bertujuan agar pelaksanaan pengelolaan pendidikan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya otonomi daerah, sehingga daerah-daerah yang ada di Indonesia memiliki wewenang dalam mengelola pendidikan masing-masing yang ada di daerahnya.

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan khususnya di Kabupaten Enrekang dipertegas dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Enrekang, yang mengamanatkan Kabupaten dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Enrekang berkewajiban mengelola pendidikan di Kabupaten Enrekang dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada, dalam hal ini yang memiliki tanggung jawab untuk membantu Bupati dalam urusan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Enrekang yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Enrekang yaitu dari segi aspek Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan juga dari aspek Sarana dan Prasarana yang ada. Dari aspek Pendidik dan Tenaga kependidikan di Kabupaten Enrekang yang tersedia masih belum mencukupi kuantitas kebutuhan Tenaga Pendidik yang tersebar di

wilayah-wilayah Kabupaten Enrekang. Masih terdapat (503 Guru) kekurangan guru kelas di satuan pendidikan Sekolah Dasar dan juga (120 Guru) Sekolah Menengah Pertama. Adapun tabel mengenai kekurangan guru dari satuan pendidikan dasar di Kabupaten Enrekang yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kekurangan Guru Di Kabupaten Enrekang

Guru SD	Jumlah kekurangan Guru
Guru Kelas	345 Guru
Guru PJOK	76 Guru
Guru PAI	82 Guru
Guru SMP	Jumlah Kekurangan Guru
Guru Agama	1 Guru
Guru PKN	3 Guru
Guru Bhs. Indonesia	19 Guru
Guru Bhs. Inggris	5 Guru
Guru Matematika	8 Guru
Guru IPA	9 Guru
Guru IPS	2 Guru
Guru Seni Budaya	13 Guru
Guru Penjas	12 Guru
Guru TIK	31 Guru
Guru BK	16 Guru

Sumber: LHP Inspektorat Kabupaten Enrekang, 2021

Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus terpenuhi agar proses pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Enrekang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pemecahan masalah tersebut agar dapat menciptakan nuansa pendidikan yang baik, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) huruf a “Memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi”. Kondisi tersebut juga belum memenuhi

maksud dari BAB IX pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dari segi Aspek Sarana dan Prasarana di Kabupaten Enrekang juga masih memiliki kendala atau kekurangan dalam hal sarana dan prasarana di satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan juga Sekolah Menengah Pertama (SMP), masih terdapat beberapa kekurangan pada Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium, Ruang sekolah yang masih mengalami kerusakan dan beberapa fasilitas pendidikan lainnya yang membutuhkan rehabilitasi dan pembaruan disatuan pendidikan tersebut. Kondisi ini tidak sesuai dengan Huruf D BAB II Poin (4 dan 5) Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), yang berbunyi :

Huruf D Kelengkapan Prasarana dan sarana pada Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. *Ruang kelas,*
2. *Ruang perpustakaan,*
3. *Ruang laboratorium IPA,*
4. *Ruang pimpinan,*
5. *Ruang guru,*
6. *Tempat beribadah*
7. *Ruang UKS*

8. *Ruang konseling,*
9. *Jamban*
10. *Gudang*
11. *Ruang sirkulasi,*
12. *Tempat bermain/berolahraga*

Akibatnya kondisi Sarana dan Prasarana pada masing-masing satuan pendidikan tersebut dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar tidak berjalan secara optimal.

Pemerintah memiliki tugas dalam pengadaan Sarana dan Prasarana di satuan pendidikan tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) huruf c yakni “Menyediakan prasarana, sarana, alat dan media belajar serta buku pelajaran secara memadai”.

Dari permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang memiliki peran dalam melakukan pemenuhan kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan juga pengadaan Sarana dan Prasarana yang cukup agar menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Enrekang agar menjadi lebih baik dalam proses penyelenggaraannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dalam hal ini tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan melakukan penelitian dan

pembahasan yang dituangkan dalam bentuk penulisan Skripsi dengan judul

“Analisis Pelaksanaan Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Di Kabupaten Enrekang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan bidang pendidikan di Kabupaten Enrekang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penyelenggaraan bidang pendidikan di Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan bidang pendidikan di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan bidang pendidikan di Kabupaten Enrekang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan bidang pendidikan di Kabupaten Enrekang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan bidang pendidikan di Kabupaten Enrekang.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan juga bisa dibandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan bidang pendidikan di Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Analisis

Secara umum, arti dari analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

Pengertian analisis yaitu penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki atau juga dilakukan pengembangan. Kata Analisis sendiri berasal dari kata analisa, dimana penggunaan pada kata ini mempunyai arti kata yang berbeda tergantung bagaimana kita meletakkan kata ini.

Kata analisis sendiri diadaptasi dari bahasa Inggris "*analysis*" yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno "*ἀνάλυσις*" (dibaca *Analisis*). Kata Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu "*ana*" yang artinya kembali, dan "*lyein*" yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Kemudian kata tersebut juga diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi analisis.

Menurut asal katanya tersebut, analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya serta pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Analisis menurut Komaruddin (1994:31) mengemukakan pengertian analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan. Dari pengertian di atas, maka analisis menyangkut beberapa unsur pokok antara lain sebagai berikut:

1. Analisis merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang didasari pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin diketahui.

2. Mempelajari bagian pembagian secara rinci dan cermat sehingga apa yang ingin diketahui menjadi gambaran yang utuh dan jelas.
3. Ada tujuan yang ingin dicapai yaitu pemahaman yang tepat terhadap sebuah objek kajian.

Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub komponen–sub komponen yang lebih kecil.

Dari beberapa pengertian analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Analisis merupakan proses-proses pengamatan dan pemikiran atau penilaian terhadap sesuatu hal atau objek tertentu yang akan dianalisa, analisis juga merupakan serangkaian kegiatan berpikir dan mengamati lingkungan sekitar dalam menciptakan sebuah kesimpulan dari pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan yang ada.

2.2 Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan. Pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Fungsi pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan non-manusia pada pelaksanaan tugas.

Fungsi dari pelaksanaan (*actuating*) menurut James Stoner dalam Al Istiqomah adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Adapun tujuan pelaksanaan antara lain yaitu:

1. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien.
2. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf.
3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf.
5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Menyimpulkan tujuan pelaksanaan di atas, pemimpin sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Karena pemimpin harus senantiasa mengusahakan suasana kerja yang meningkat, salah satu yang harus dilakukan pemimpin terhadap bawahannya dengan memberikan motivasi dan penghargaan bagi bawahan berprestasi supaya mereka lebih semangat dalam bekerja.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diartikan menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan

sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

2.3 Konsep Penyelenggaraan

Penyelenggaraan berasal dari kata “selenggara” yang berarti mengatur. Adapun pengertian penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses melakukan kegiatan tertentu. Penyelenggaraan dapat diartikan dengan pengorganisasian, dari kata “pengorganisasian” tersebut, yang memiliki kata dasar “organisasi”.

Menurut Handoko (2003:167) organisasi mempunyai dua pengertian umum yaitu Pertama, Menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu perkumpulan olahraga. Kedua, Berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi di alokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Penyelenggaraan merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupnya. Penyelenggaraan adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang

diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa penyelenggaraan merupakan proses awal untuk menempatkan orang-orang baik individu maupun kelompok kedalam struktur organisasi demi mencapai tujuan organisasi tersebut.

Pelaksanaan proses penyelenggaraan yang sukses, akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Proses ini akan tercermin pada struktur organisasi, yang mencakup aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian, yaitu; pembagian kerja, departementalisasi, bagan organisasi formal, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat-tingkat hirarki manajemen, saluran komunikasi, penggunaan komite, rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tak dapat dihindarkan, (Handoko, 2003:168-169).

2.4 Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang

wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri

atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah merupakan satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan bertanggung jawab daerah sepenuhnya. Kewenangan sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan

kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom seperti yang dikemukakan oleh Nugroho (2000:90) yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan

daerah diatur dalam undang-undang, bisa ditarik benang merah bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan".

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Sosial.

2.5 Konsep Pendidikan

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksana pendidikan (Guru).

Hal ini sejalan dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagai salah satu negara berkembang, pendidikan di Indonesia terus berbenah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.

Usaha perbaikan pendidikan di Indonesia merupakan usaha untuk mengubah pandangan negara lain bahwa negara berkembang kurang baiknya manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pelayanan pendidikan dan tingkat kecakapan administratif agar mendukung mereka menjadi negara yang maju. Karena itu bisa dikatakan bahwa setiap tujuan negara berkembang memiliki kemiripan, yaitu diantaranya adalah memenuhi standar minimum pendidikan, kesehatan, perumahan dan makanan bagi masyarakat.

Salah satu pokok masalah yang dihadapi bangsa ini untuk memasuki era globalisasi adalah kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SDM) yang relatif rendah yang dicermati dari pemilikan latar pendidikannya. Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian semua pihak, terlebih dalam suasana krisis multidimensi yang terjadi saat ini, masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi persaingan bebas.

Untuk itu Pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini para peraku pembangunan pendidikan berupaya untuk menaikkan derajat mutu pendidikan Indonesia agar dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja dengan menyesuaikan pembangunan pendidikan itu sendiri. Menurut Surya (2007: 5), dinyatakan bahwa pendidikan diperlukan untuk meraih kedudukan dan kinerja optimal pada setiap pekerjaan dilakukan. Pendidikan adalah sebuah sistem formal yang mengajarkan tentang pengetahuan, nilai-nilai dan pelbagai keterampilan.

Tujuan Standar Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2005:72) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa Standar Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Pasal 3 dan 4).

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 PP No. 19 Tahun 2007) untuk meningkatkan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan pengukuran kualitas pendidikan. Standar tersebut bukan merupakan ukuran yang statis yang tidak berubah, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan. Selain itu standar pendidikan juga berfungsi sebagai pemetaan pendidikan yang bermutu.

2.6 Kerangka Pikir

